BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan tingkat populasi penduduk yang tinggi di dunia. Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi. Yang artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri urusan yang ada di daerah. Melalui proses desentralisasi yang berjalan sampai saat ini telah memberikan kesadaran tentang potensi lokal dan bagaimana daerah dapat meningkatkan kemandirian. Adanya desentralisasi diyakini dapat membantu pemerintah dalam melihat prioritas kebutuhan masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan pedesaan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Dana Desa (DD) adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemerdayaan masyarakat desa. Maksud dari pemberian Dana Desa adalah sebagai stimulan atau dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan

pemberdayaan masyarakat, demi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan disetiap desa berjalan secara maksimal, maka tujuandari pemerintah pusat untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan akan dapat terwujud (Miftahuddin, 2018). Pada era reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan.

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel merupakan pengelolaan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sector publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan

sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa (Wardana, Ibnu: 2016) Pemberian Dana Desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangun di wilayahnya.

Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu

parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo (2009: 20) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Banyaknya kasus positif Covid-19 telah mengakibatkan keresahan mendalam yang dialami seluruh rakyat Indonesia. Pandemi Covid-19 menyebabkan dampak buruk yang hampir dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Coronavirus atau disebut juga Covid-19 adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui batuk, pilek hingga yang lebih serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit Covid-19 (WHO, 2020). Data penyebaran virus corona ini di Indonesia hingga bulan Juni 2021 sebanyak 41.431 kasus positif, 2.276 orang meninggal

(Kompas, 2021). Terutama pada wilayah Jawa Timur tercatat sebanyak 3.359 kasus positif, 11.923 orang meninggal (Info Jatimprov, 2021)

Akibat adanya Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi perekonomian ditingkat desa salah satunya adalah dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan anggaran yang dapat di alokasikan secara langsung untuk mendukung upaya mengurangi dampak dari wabah ini ditingkat rumah tangga dan desa.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang dapat terlihat di terbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan

pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, penyesuaian alokasi atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu.

Menurut data sensus Badan Pusat Statistik tahun 2020, Masyarakat kabupaten Jombang berjumlah 1.318.062 jiwa yang terdiri atas 664.605 Laki-laki dan 653.457 Perempuan. Desa kedunglumpung merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Dengan jumlah masyarakat yang juga cukup banyak tentu juga memiliki beberapa problematika pada pandemi ini. Pendapatan serta menurunnya ekonomi diakibatkan wabah, semakin meningkatkan resiko masyarakat. Menariknya beberapa program yang sudah terlebih dahulu diluncurkan oleh pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Bantuan sembako, Bansos tunai, dan Subsidi listrik.

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu adanya laporan pemanfaatan dan penggunaan dana desa di Kedunglumpung yang sesuai dengan peraturan pemerintah untuk menjawab apakah kebijakan pusat mampu di terapkan baik dalam pemerintahan daerah khususnya desa. Secara khusus tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemanfaatan dana desa di Kedunglumpung ingin menjelaskan penggunaan dana desa untuk pencegahan Covid-19.

Dari penjelasan-penjelasan diatas, yang menunjukkan tentang desa serta dana desa (DD) dan pemanfaatan dana desa pada masa

pandemic Covid-19. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi lebih mendalam dengan judul “Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Kedunglumpang Kecamatan Mojoagung”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan keterangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19??

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pada umumnya serta ilmu ekonomi pada khususnya mengenai pemanfaatan dana desa selama pandemi Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi pemerintah terutama dalam hal pemanfaatan dana desa selama pandemi Covid-19.

2. Bagi Masyarakat Desa

Dapat dijadikan pandangan bagi masyarakat untuk memahami tujuan adanya dari pemanfaatan dana desa selama pandemi Covid-19.